



KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2022

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KOTA BANGUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Kota Bangun. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Kota Bangun. Semoga LKjIP Kecamatan Kota Bangun ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Kota Bangun, Februari 2023

Camat Kota Bangun



Drs. Mawardi

NIP. 196608251994031005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	1	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Kota Bangun	62	N/A	0
		2	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	1	0	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

		3	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	100	100	100
		4	Pengamanan Bidang Tanah	42	2	21,43
		5	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	100	100	100
		6	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	100	100	100
		7	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	100	32	100
		8	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Baik (B) 60-70	Kurang (C) 48.93	69,9
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kota Bangun	9	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kota Bangun	71	80,38	113
3	Meningkatkan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun	10	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Kota Bangun	49,68	52.66	114,05



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

4	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	11	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	100	100	100
---	---	----	--	-----	-----	-----



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	7
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	E. Sumber Daya Aparatur	9
	F. Sumber Daya Keuangan	10
	G. Isu-Isu Strategis	10
	H. Sistematika Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
	A. Perencanaan Kinerja	
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	16
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	19
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
	B. Perjanjian Kinerja	24
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2022	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	33
	A. Pengukuran Kinerja	33
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	37
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	37
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	51
	3 Analisis Kinerja Sasaran 3	53
	4 Analisis Kinerja Sasaran 4	57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

	C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	61
	D. Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP	72
LAMPIRAN		xii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2022	6
Tabel 1.3	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	7
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Eselon	10
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 2.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kota Bangun	19
Tabel 2.4	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	25
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	26
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	26
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022	27
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	29
Tabel 3.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022.....	33
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	37
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	38
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut.....	39
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Sasaran Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut Tahun 2022.....	39
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

Tabel 3.7	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	40
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah...	41
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah	41
Tabel 3.10	Data Tanah Kecamatan Kota Bangun.....	42
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023 ...	45
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023 ...	45
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	47
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	47
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	48
Tabel 3.16	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	48
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.19	Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022	50
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	52
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Sasaran Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun.....	52
Tabel 3.22	Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022	53
Tabel 3.23	Pengukuran Kinerja dengan indikator Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun.....	54
Tabel 3.24	Realisasi Indikator Sasaran Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun.....	54
Tabel 3.25	Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat	55
Tabel 3.26	Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2022	56
Tabel 3.27	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	57
Tabel 3.28	Realisasi Indikator Sasaran Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun.....	58
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2020.....	59



Tabel 3.30	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	62
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Tahun 2022	64
Tabel 4.1	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	72
Tabel 4.2	Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	74



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Kota Bangun dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Kota Bangun Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi



pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kota Bangun
2. Mendorong Kecamatan Kota Bangun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kota Bangun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kota Bangun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan

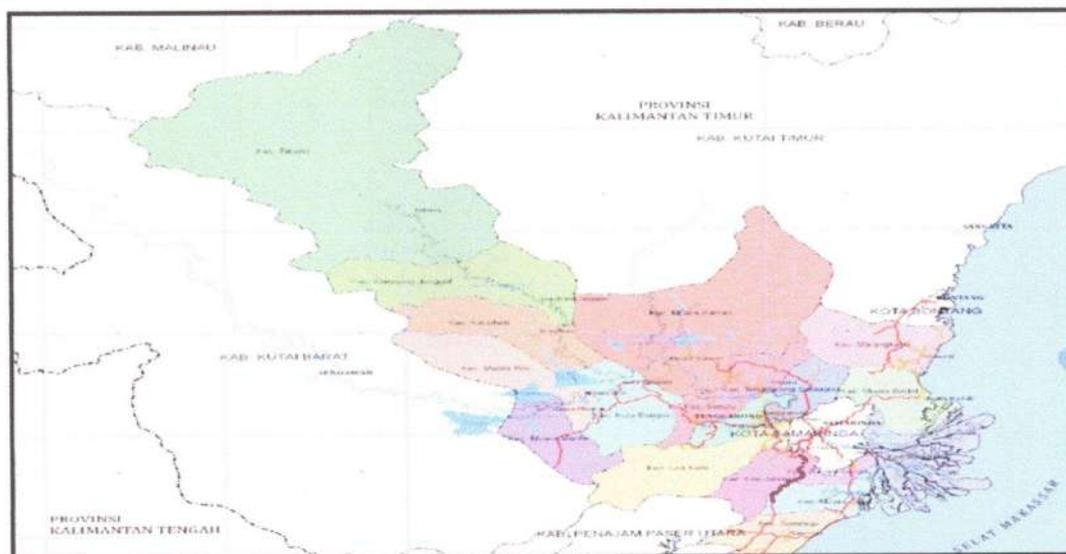


perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Kota Bangun masuk dalam zona Hulu yang terletak diantara terletak antara 116°27'–116°46' Bujur Timur dan 0°07'– 0°36' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 897.9 km². Kecamatan Kota Bangun secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kenohan Sebelah Timur: Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu, Sebelah Selatan: Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kenohan Sebelah Barat: Kecamatan Muara Wis

Luas Kecamatan Kota Bangun 897.9 Km². Secara administratif Kecamatan Kecamatan Kota Bangun terdiri atas 21 desa. Wilayah Kecamatan Kota Bangun terdiri dari 21 desa, diantaranya

Desa Kota Bangun III, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun I, Desa Wonosari, Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa

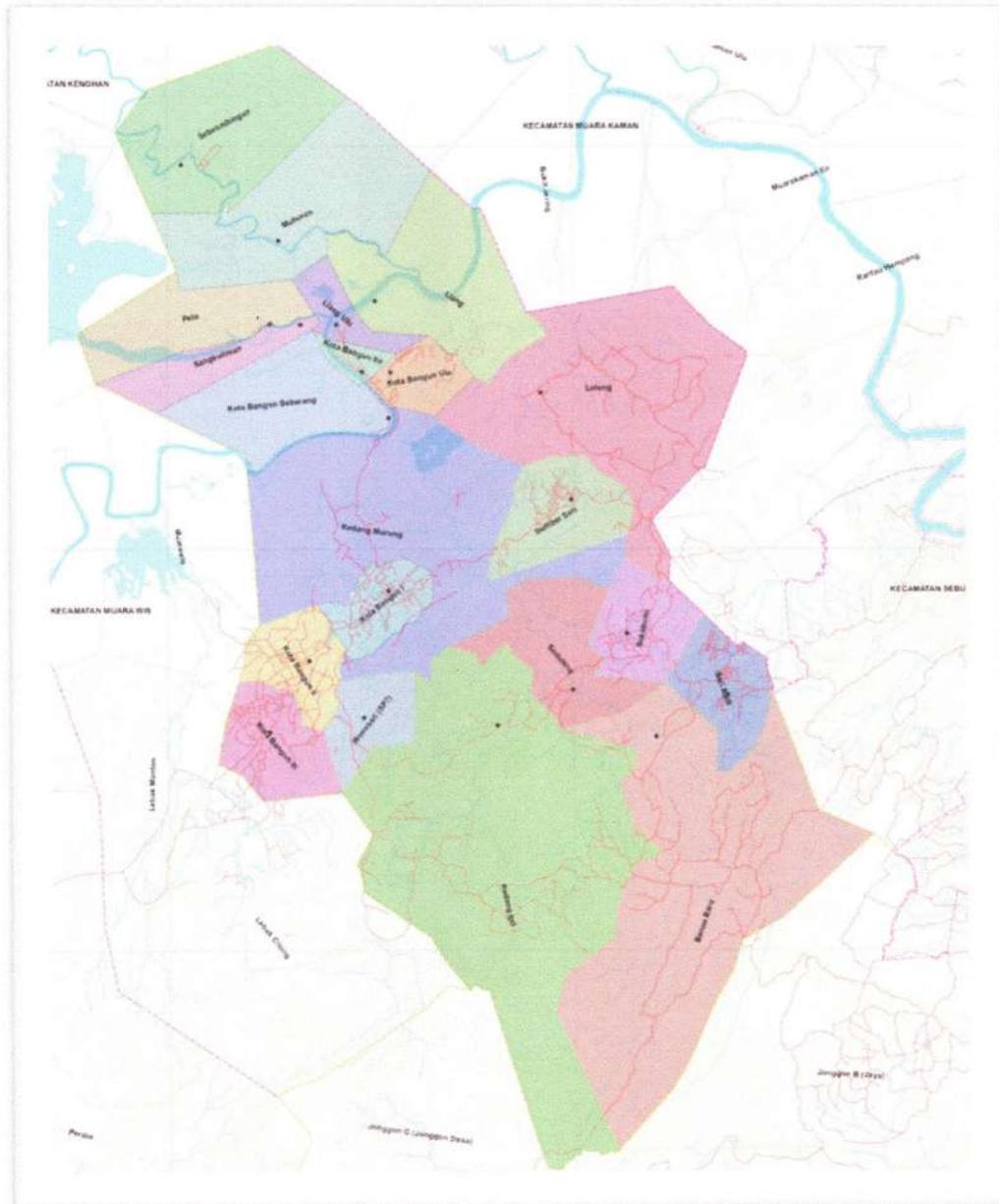


Loleng, Desa Liang Ilir, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan dan Desa Sangkuliman. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Kota Bangun Ulu. Dari desa tersebut, Desa Kedang Ipil dan Desa Benua Baru merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu



41 kilometer, sedangkan Desa Kota Bangun Seberang merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan, yaitu 2 kilometer. Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat maupun melalui jalan sungai dengan menggunakan perahu, perahu motor,

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan Kota Bangun sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Bangun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Wilayah
1	Kota Bangun III	21	2,3
2	Kota Bangun II	16	1,8
3	Kota Bangun I	13	1,4
4	Wonosari	14	1,6
5	Kedang Ipil	169	18,8
6	Benua Baru	135	15,0
7	Sedulang	51	5,7
8	Sukabumi	20	2,2
9	Sarinadi	19	2,1
10	Sumber Sari	24	2,7
11	Kota Bangun Ulu	11	1,2
12	Loleng	143	15,9
13	Liang	48	5,3
14	Kota Bangun Ilir	4	0,4
15	Pela	27	3,0
16	Muhuran	55	6,1
17	Kota Bangun Seberang	33	3,7
18	Kedang Murung	24	2,7
19	Liang Ulu	9	1,0
20	Sebelimbingan	49	5,5
21	Sangkuliman	14	1,6
	Total	899	100

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun

Jumlah penduduk mencapai **38.043** jiwa (*Data Sistem Informasi Admininstrasi Kependudukan / SIAK Kecamatan Kota Bangun*), Adapun persebaran jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara per kecamatan:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun Semester II Tahun 2022

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Kedang Ipil	761	655	1.416
2	Benua Baru	183	156	339
3	Sedulang	197	161	358
4	Loleng	1192	1088	2.280



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

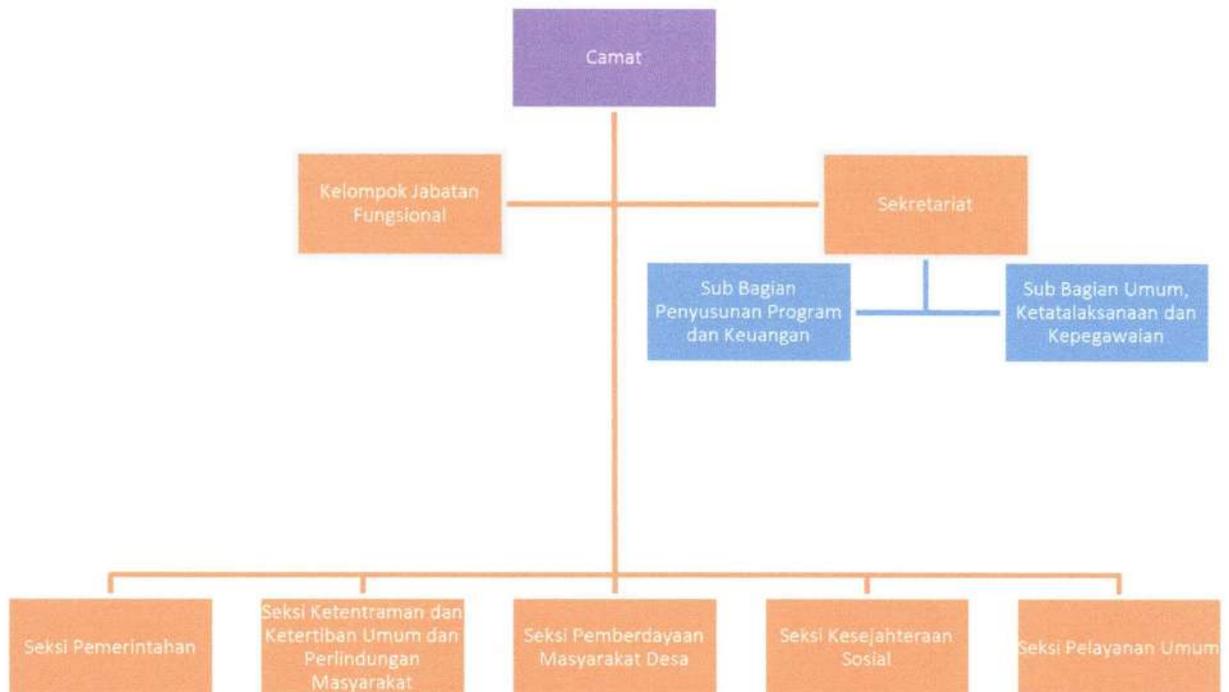
5	Kota Bangun Ulu	2962	2862	5.824
6	Kota Bangun Ilir	1653	1491	3.144
7	Liang	1321	1246	2.567
8	Muhuran	361	320	681
9	Pela	302	258	560
10	Kota Bangun I	596	561	1.157
11	Kota Bangun II	1305	1219	2.524
12	Kota Bangun III	1611	1493	3.104
13	Sumber Sari	722	644	1.366
14	Sari Nadi	854	760	1.614
15	Suka Bumi	739	712	1.451
16	Wonosari	297	250	547
17	Kota Bangun Seberang	1301	1242	2.543
18	Kedang Murung	1350	1283	2.633
19	Liang Ulu	1256	1203	2.459
20	Sebelimbingan	295	289	584
21	Sangkuliman	486	406	892
JUMLAH		19744	18299	38.043

Sumber Data: SIAK Kecamatan Kota Bangun



C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pembentukan Kecamatan Kota Bangun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;



3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.



E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kota Bangun per 31 Desember 2022 sebanyak **12.985** orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	-	-	0	0%
2	SLTP	2	-	2	5%
3	SLTA	19	4	23	59%
5	D-I	-	-	0	0%
6	D-II	-	-	0	0%
7	D-III	-	-	0	0%
8	D-IV	-	-	0	0%
9	S1	12	2	14	36%
10	S2	-	-	0	0%
11	S3	-	-	0	0%
	Jumlah	33	6	39	100%

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	-	1	3%
2	II	21	2	23	59%
3	III	10	4	14	36%
4	IV	1	-	1	3%
	Jumlah	33	6	39	100%

c. Berdasarkan Eselon



Tabel 1.6. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	-	-	0	0%
2	II.b	-	-	0	0%
3	III.a	1	-	1	17%
4	III.b	1	-	1	17%
5	IV.a	1	1	2	33%
6	IV.b	1	1	2	33%
Jumlah		4	2	6	100%

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun pada Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kota Bangun mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.536.342.435 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance



and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Bangun pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kota Bangun. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Kota Bangun adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Kota Bangun dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kota Bangun yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Kota Bangun telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021, dan setelah melakukan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2021 – 2026 sehingga Kecamatan Kota Bangun menyusun Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan;



Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Kota Bangun mengampu **Misi pertama** dan **Misi Keempat** yang terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Insikator Sasaran
1.	Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
				Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)
2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah (Kabupaten)	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Kota Bangun berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
- Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indikator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan



	Urusan Pemerintahan Umum								
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kota Bangun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatkan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

			Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah



d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah



				Kecamatan
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja



terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	70
		2	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindak Lanjuti	Jumlah	75
		3	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	75
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Jumlah	69,70
		5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK / Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		2	Persentase Identifikasi Inventarisasi Dalam Penelusuran	Persen	100



		3	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42
		4	Persentase Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		5	Tingkat Kepatuhan Serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		6	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		7	Predikat Tatakelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60 -70
3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2
6	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	1	Capaian Output Kegiatan	Persen	2

C. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun Anggaran 2022, Kecamatan Kota Bangun melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. **17,843,067,380,00** Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2022 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar Rp. **24.536.342.435,00**

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022



Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 17,843,067,380,00	Rp. 24.536.342.435,00	Rp. 6.693.275.055,00

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	7.822.721.168,00	23.481.433.186,00	7.367.648.476,00
Belanja Modal	579.796.212,00	1.044.909.249,00	473.157.037,00
Total	17,843,067,380,00	24.536.342.435,00	6.693.275.055,00

2 Realisasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2022, Kecamatan Kota Bangun mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2. 8. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah	8.048.057.907,00	8.449.291.836,00	401.233.929,00



Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	326.954.636,00	433.248.436,00	106.293.800
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
Total	17,843,067,380,00	24.536.342.435,00	6.693.275.055,00

2. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 merencanakan 5 (Lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2. 9. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.048.057.907,00	8.449.291.836,00	401.233.929,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.970.705,00	21.970.705,00	1.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.970.705,00	10.970.705,00	0,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.575.107.126,00	5.000.363.897,00	574.743.229,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.569.107.126,00	4.994.363.897,00	574.743.229,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.649.940,00	1.142.324.000,00	993.674.060,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.950.440,00	641.291.500,00	621.341.060,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	188.903.000,00	188.903.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.959.000,00	62.959.000,00	30.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,190,000,00	156,670,000,00	135.480.000,00
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49,910,500,00	67,860,500,00	17.950.000,00
V	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	685.000.000,00	1.276.666.166,00	591.666.166,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	302.531.129	122.531.129,00
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	505.000.000,00	974.135.037	469.135.037,00
VI	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	1.310.251.364,00	1.471.628.356,00	161.376.992,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	702.560.000,00	882.331.988,00	179.771.988,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.691.364,00	583.296.368,00	21.394.996,00
VII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	153.850.000,00	183.090.000,00	29.240.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.850.000,00	7.700.000,00	3.850.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	175.390.000,00	25.390.000,00
B	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00



I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.450.000.000,00	15.445.147.326,00	5.995.147.326,00
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	9.450.000.000,00	15.435.147.326,00	15.435.147.326,00
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	326.954.636,00	433.248.436,00	106.293.800
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	326.954.636,00	433.248.436,00	106.293.800
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000,00	12.103.800,00	12.896.200,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	301.954.636,00	421.144.636,00	119.190.000,00
D	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

<i>Daerah</i>				
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.654.837,00	18.654.837,00	15.000.000,00
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.654.837,00	18.654.837,00	15.000.000,00
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.654.837,00	3.654.837,00	0,00
Total		17,843,067,380,00	24.536.342.435,00	6.693.275.055



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus



sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan



memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kota Bangun atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2022 yang terdiri dari 4 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja	
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	1	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Kota Bangun	Nilai	62	N/A	0	Kurang Berhasil
		2	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	0	0	Kurang Berhasil
		3	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100	Sangat berhasil
		4	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	2	21,43	Kurang Berhasil
		5	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah	Persen	100	100	100	Sangat berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

			keepakatan RAPBD Tahun 2022)					
		6	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	Sangat berhasil
		7	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	32	100	Sangat berhasil
		8	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Kurang (C) 48.93	69,9	Cukup Berhasil
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kota Bangun	9	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Nilai	71	80,38	113	Sangat berhasil
3	Meningkatkan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun	10	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Kota Bangun	Persen	49,68	52.66	114,05	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	11	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	Persen	100	100	100	Sangat berhasil

Berdasarkan Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026, pada Tahun 2022 Kecamatan Kota Bangun memiliki 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada Tahun 2022 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu



memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada Tahun 2022, Kecamatan Kota Bangun memiliki 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 7 Indikator, atau 63,64 %;
- b) Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 0,00 %;
- c) Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 9,09 %; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 3 Indikator, atau 27,27 %.

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun ”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan 11 (Sebelas) indikator yaitu sebagai berikut:

1.1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
----	---------	-----------	-----------------------



1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Predikat Kinerja Kecamatan Bangun	Akuntabilitas Kinerja Kota	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah
----	---	-----------------------------------	----------------------------	--

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun	Nilai	62	NA	NA

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun” tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2022 Kecamatan Kota Bangun tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Walaupun Tahun 2022 di Kecamatan Kota Bangun tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, tetapi kewajiban perangkat daerah terhadap pemenuhan dokumen-dokumen terkait Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, seperti Menyusun Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Pemenuhan atas kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Aplikasi <https://sakup.kukarkab.go.id/>.

1.2. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut mencapai 0 % dan termasuk predikat “Kurang Berhasil” sebagaimana disajikan dalam



tabel berikut:

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang telah ditindak lanjuti perangkat daerah

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Sasaran Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah	1	0	0

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2022 yaitu menindak lanjuti temuan BPK/Inspektorat sebanyak 0 temuan dan di tahun 2022 terealisasi sebanyak 0 temuan yang ditindak lanjuti

Dari hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 0%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian kurang berhasil.)

1.3. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam



tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
3.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kecamatan	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Hasil tindak lanjut perangkat daerah dalam menyampaikan perbaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2018-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.7. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	100	100	100	100

Target kinerja indikator ke-3 tahun 2022 yaitu sebesar 100% dari Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran, dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah yang dilakukan penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi

1.4. Pengamanan Bidang Tanah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Pengamanan



Bidang Tanah mencapai **21,43 %** dan termasuk predikat **“Kurang Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Pengamanan Bidang Tanah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
4.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Pengamanan Bidang Tanah	Perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan tanah oleh Bidang Aset BPKAD.

Tabel 3.9. Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	2	(% capaian disesuaikan dgn rumus capaian kinerja)

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Kota Bangun mengelola 42 (empat puluh dua) tanah bangunan seperti data pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Data Tanah Kecamatan Kota Bangun

No	Bidang Tanah	Alamat	Luas (M ²)	Status	Pemanfaatan/ Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Jl. K.H. Dewantara	1.155,00	BELUM SERTIFIKAT	Rumah Jabatan
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Jl. Mulawarman II KBU	255,00	BELUM SERTIFIKAT	RUMAH DINAS CAMAT LAMA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Jl. Mulawarman II KBU	3.399,00	BELUM SERTIFIKAT	RUMAH DINAS SEKCAM DAN STAFF
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	JALAN KIHAJAR DEWNATARA	225,00	BELUM SERTIFIKAT	RUMAH DINAS STAF DAN HANSIP
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Ki Hajar Dewantara	978,00	BELUM SERTIFIKAT	Kantor Camat
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KOTA BANGUN ULU	1.115,00	BELUM SERTIFIKAT	KANTOR BPD
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	DESA KOTA BANGUN ULU	500,00	BELUM SERTIFIKAT	KANTOR KORAMIL
8	Tanah Bangunan Poliklinik	DESA PELA	4.700,00	BELUM SERTIFIKAT	POLIKLINIK
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	KOTA BANGUN ILIR	14.158,00	BELUM SERTIFIKAT	LAPANGAN BOLA
10	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	Jl. M. SIDDIK. DESA KOTA BANGUN ULU	2.500,00	BELUM SERTIFIKAT	PDAM
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Sebelimbangan Kecamatan Kota Bangun	5.052,00	BELUM SERTIFIKAT	Lokasi Fasilitas Umum
12	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	DESA KOTA BANGUN ULU	748,00	SERTIFIKAT	POS KORAMIL
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KOTA BANGUN ULU	2.600,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI TANAH DESA(KONVENSI PEMINDAHAN 13 KEPALA KELUARGA WARGA TEPIAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

					TABOR)KEC.KOTA BANGUN
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	LIANG ULU	2.970,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI KANTOR DESA DI DESA LIANG ULU KEC.KOTA BANGUN
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KEDANG MURUNG	1.096,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI FASILITAS UMUM (KANTOR DESA,BPD,DAN SEKRETARIAT PKK)KEC.KOTA BANGUN
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KEDANG MURUNG	5.315,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK FASILITAS UMUM (KANTOR DESA,BPD,DAN SEKRETARIAT PKK)KEC.KOTA BANGUN
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KEDANG MURUNG	2.107,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI FASILITAS UMUM(KANTOR DESA,BPD,SEKRETARIAT PKK)KEC.KOTA BANGUN
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KEDANG MURUNG	1.412,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK FASILITAS UMUM(KANTOR DESA,BPD,DAN SEKRETARIAT PKK)KEC.KOTA BANGUN
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	LIANG ILIR	5.065,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI LAPANGAN SEPAK BOLA (LIANG MANDIRI)KEC. KOTA BANGUN
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KOTA BANGUN ILIR	7.550,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI FASILITAS DESA (PERLUASAN LAPANGAN SEPAK BOLA)KEC.KOTA BANGUN
21	Tanah	KECAMATAN	0,00	BELUM	SEKRETARIAT PKK



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KOTA BANGUN		SERTIFIKAT	
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	KOTA BANGUN SEBERANG	9.772,00	BELUM SERTIFIKAT	UNTUK LOKASI FASILITAS DESA (KANTOR DESA, BPU DAN BPD)
23	Kuburan Lainnya	Desa Sedulang Kec. Kota Bangun	4.375,00	BELUM SERTIFIKAT	Lahan Kuburan
24	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun	6.500,00	BELUM SERTIFIKAT	Fasilitas Kecamatan
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	208,00	BELUM SERTIFIKAT	Kantor
26	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun	5.000,00	BELUM SERTIFIKAT	SDN 029
27	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	444,00	BELUM SERTIFIKAT	TK Abdi Bangsa
28	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun	20.671,00	BELUM SERTIFIKAT	SMP Gotong Royong
29	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun	6.747,00	BELUM SERTIFIKAT	untuk Kas Desa
30	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	16.341,00	BELUM SERTIFIKAT	SDN 001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

31	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	258,00	BELUM SERTIFIKAT	Perluasan Kantor Desa Muhuran
32	Tanah Lapangan Sepak Bola	Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun	3.580,00	BELUM SERTIFIKAT	Lapangan Sepak Bola
33	Tanah Untuk Jalan Desa	Desa Loleng Kec. Kota Bangun	2.608,00	BELUM SERTIFIKAT	Jalan Desa
34	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	Jl. Stadion Rt.02 Kota Bangun Ulu	18.939,00	BELUM SERTIFIKAT	SK Penetapan Lokasi Keperluan Pembangunan Stadion Mini Kota bangun No.590/596/PL/037/A.Ptn
35	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	JL. SRI BANGUN KEC. KOTA BANGUN	5.832,00	BELUM SERTIFIKAT	Rumah Dinas Staf
36	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	930,00	BELUM SERTIFIKAT	Tanah Rumah Veteran
37	Tanah Bangunan Pasar	JL. JEND. A. YANI. KEC. KOTA BANGUN	1.430,00	BELUM SERTIFIKAT	Pasar Laut
38	Tanah Bangunan Pasar	DESA KEDANG MURUNG. KEC. KOTA BANGUN	8.000,00	SERTIFIKAT	Pasar Rimba Ayu
39	Tanah Bangunan Pasar	Desa Pela	613,00	BELUM SERTIFIKAT	Pasar Desa
40	Tanah Bangunan Terminal Darat	JL. SRI BANGUN.	4.763,00	BELUM SERTIFIKAT	Terminal



		KEC. KOTA BANGUN			
41	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	5.000,00	BELUM SERTIFIKAT	BPU
42	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	58.450,00	BELUM SERTIFIKAT	Lapangan Terbang

Target kinerja indikator ke-2 tahun 2022 yaitu sebesar 42 bidang tanah yang mendapat pengamanan. Dari target tersebut, semua aset tanah yang ada di Kecamatan Kota Bangun sudah tercatat dalam SIMDA BMD (KIB A) dengan kondisi sudah memiliki patok. Hanya saja belum ada 40 persil yang belum bersertifikat sehingga kedepan akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara sehingga semua tercatat dengan sertifikat, Capaian kinerja target indikator ke-4 sebesar 21,43 % dengan kriteria penilaian sangat rendah.

1.5. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023) mencapai **100 %** dan termasuk predikat "**Sangat Berhasil**" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator terlihat pada tabel berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
5.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Kesesuaian Anggaran Belanja SIPD Dan Isian Data RUP, per Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 12:02 Wita.

Tabel 3.12. Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja indikator ke-2 tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Kota Bangun telah



terinput seluruh kegiatan pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Aplikasi SIRUP, sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

1.6. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022

1.7. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal **31 Januari 2022** mencapai **100 %** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

1.8. Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal **31 Januari 2022** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
6.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022	Report Penyampaian LHKPN dari Aplikasi e-LHKPN.

Tabel 3.14. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
6.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2022 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 6 pejabat structural dilingkungan PD Kecamatan Kota Bangun yang wajib lapor semuanya sudah mengisi



LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 Januari 2022. Untuk indikator ke-6 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

1.9. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022 mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
7.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022	Report Penyampaian LHKASN, data kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.16. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
7.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022	Persen	100	32	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2022 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil rekap data dari Target 32 ASN terealisasi 32 ASN yang mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum



tanggal 31 Januari 2022, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100 % dengan kriteria penilaian sangat Tinggi. Hal ini menjadi catatan Sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih intens dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar dapat melaporkan dan menginput LHKASN sebelum dari batas waktu yang menjadi target kinerja penilaian

1.10. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah mencapai **Kurang (C) 48.93 %** dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Rumusan dari indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.18. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Kurang (C) 48.93	69,9%

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8” Tahun 2022 adalah predikat BAIK dan realisasinya mendapatkan Predikat Kurang yang merupakan hasil



audit oleh tim evaluasi tata kelola arsip perangkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum maksimalnya tata kelola kearsipan di kecamatan kota bangun solusi/rekomendasinya adalah meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas SDM dalam pengelolaan kearsipan.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.19. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.449.291.836,00	6.874.330.491,00	81.36
2.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	18.654.837,00	3.540.000,00	18.98
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	433.248.436,00	320.929.800,00	74.08
TOTAL		8.901.195.109,00	7.198.800.291,00	80.87

Realisasi Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 7.198.800.291,00 dari Anggaran sebesar Rp. 8.901.195.109,00 atau 80.87 %. Realisasi keuangan sebesar 80.87 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 73.5 %, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Pada program yang ada terdapat kegiatan yang tidak terakomodir pada Pemekaran Kecamatan Kota bangun Darat, dikarena belum terealisasi pemekaran Kecamatan Kota Bangun Darat.
2. Masih terdapat ketidakselarasan pada dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat perangkat Daerah.



3. Pencapaian kinerja perangkat daerah tidak seluruhnya berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah Daerah.
4. Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja belum optimal, baik dalam proses pengintegrasian sistem maupun sebagai sarana monitoring dan evaluasi, serta belum adanya pelaksanaan pemberian rewards and punishment atas capaian kinerja, namun upaya pengintegrasian sistem serta proses monitoring dan evaluasi segera bisa diwujudkan dalam upaya meningkatkan kualitas pengumpulan data kinerja .

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun” dengan indikator Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun mencapai **113 %** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

Tabel 3.21. Realisasi Indikator Sasaran Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan	Nilai	71	80,37	113



Kecamatan Kota Bangun	Kecamatan Kota Bangun								
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-9” Tahun 2022 yaitu Nilai/Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun adalah 71 dan realisasinya 80,37. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurang antusiasnya subjek penerima pelayanan dalam memberikan jawaban kuisisioner pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dasar perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Solusi / rekomendasinya adalah lebih inten untuk menginformasikan pengisian form kuisisioner tentang pelayanan yang dilakukan kecamatan Kota Bangun

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.22. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.455.147.326,00	15.352.247.254,00	99,3
TOTAL		15.455.147.326,00	15.352.247.254,00	99,3

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 15.352.247.254,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.455.147.326,00 atau 99,3 %. Realisasi keuangan sebesar 99,3 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 50 %, maka terjadi ketidak efisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Adapun faktor pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun yaitu Upaya pencegahan (preventif) penyimpangan baik dari pihak



kecamatan maupun dari intern auditor dalam pengelolaan APBD dalam menjaga kualitas dan volume pekerjaan yang telah dituangkan dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3 : “Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun” dengan indikator Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun mencapai **114 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja dengan indikator Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun	Jumlah Bobot Nilai Akses desa/kelurahan yang terhubung dengan kecamatan (darat dan air) dibagi jumlah Desa dikali 100.

Tabel 3.24. Realisasi Indikator Sasaran Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun.	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun	Persen	49,68	56.66	114

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:



Untuk data Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah adalah untuk Persentase konektivitas Desa dan kelurahan ke kota kecamatan diperoleh dari Jumlah Desa dan Kelurahan yang terhubung ke ibukota kecamatan dibagi total jumlah desa dan kelurahan dikali seratus persen, maka diperoleh Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah. Adapun formulasi perhitungan Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah sebagai berikut:

a. Persentase konektivitas desa ke kota kecamatan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Presentase Jalan Kondisi Baik (\%)}}{\text{Jumlah Presentase Jalan Ideal}} \times 100 \\ &= \frac{996}{2100} \times 100 \\ &= 47,41 \% \end{aligned}$$

b. Nilai Aksesibilitas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Presentase Konektivitas (\%)} + \text{Nilai realisasi Konektivitas}}{2} \\ &= \frac{47,41 + 18,5}{2} \\ &= 56,66 \end{aligned}$$

Kondisi geografis kecamatan Kota Bangun masih ada beberapa desanya yang masih terpisah oleh sungai . Dari 21 jumlah Desa di Kecamatan Kota Bangun, ada 5 Desa yang masih terpisah dengan sungai. Data sebaran Desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.25. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

NO	NAMA DESA	TERHUBUNG/TIDAK TERHUBUNG DENG A IBUKOTA KECAMATAN (KONEKTIVITAS)	KONDISI JALAN BAIK
----	-----------	---	--------------------



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

		IDEAL	REALISASI	IDEAL	REALISASI		
					Panjang Jalan Kondisi Baik (m)	Total Panjang Jalan (m)	Presentase Jalan Kondisi Baik (%)
1	Kedang Ipil	1	1	100	2637.7	70132	4
2	Benua Baru	1	1	100	1100	7950	14
3	Sedulang	1	1	100	1200	3840	31
4	Loleng	1	1	100	13086.5	23200	56
5	Kota Bangun Ulu	1	1	100	9543.97	15000	64
6	Kota Bangun Ilir	1	1	100	5908	11000	54
7	Liang	1	1	100	8364.1	9200	91
8	Liang Ulu	1	1	100	8610.7	10413	83
9	Kota Bangun I	1	1	100	5010	10000	50
10	Kota Bangun II	1	1	100	10266.75	25278.3	41
11	Kota Bangun III	1	1	100	7479.5	30000	25
12	Sumber Sari	1	1	100	4101.4	7500	55
13	Sarinadi	1	1	100	4585	7000	66
14	Wonosari	1	1	100	8609	12300	70
15	Kedang Murung	1	1	100	3421	15100	23
16	Kota Bangun Seberang	1	0.5	100	2860.8	33132	9
17	Sukabumi	1	1	100	3064.3	5500	56
18	Sebelimbingan	1	0.5	100	1427	2595	55
19	Muhuran	1	0.5	100	1250	2600	48
20	Sangkuliman	1	0.5	100	1598	2500	64
21	Pela	1	0.5	100	1580	3980	40
		21	18.5	2100	105703.72	308220.3	996
	Presentase		18.50				47.41
	Nilai Akseabilitas						56.66

Realisasi dana masih pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 15,352,247,254,00 dari anggaran sebesar Rp. 15,445,147,326,00 atau 99,40 %. Realisasi keuangan sebesar 99,4 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,70 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber



daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil mencapai 99,70 % tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Adapun faktor pendukung sasaran Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun :

Faktor – faktor yang mempengaruhi sasaran ini antara lain:

1. Wilayah kecamatan yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4: “Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun” dengan indikator Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	
1.	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah	Penyajian Informasi Daerah wilayah	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota	Pemenuhan kewajiban dalam menyediakan informasi terkait data dan informasi yang dikeluarkan perangkat daerah.



kecamatan Kota Bangun Bangun

Tabel 3.28. Realisasi Indikator Sasaran Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
11	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Indikator kinerja ke-11 yaitu Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun dengan target pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Kota Bangun sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data profil Desa yang tersaji 100 % dari 21 Desa Se Kecamatan Kota Bangun

Adapun faktor pendukung sasaran Meningkatkan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun

1. Ketersediaan Sarana dan prasarana, SDM yang perlu ditingkatkan untuk menunjang penyajian data yang berkesinambungan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang



dalam renstra perangkat daerah, juga memuat indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Karena indikator tambahan pada tahun 2022, sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2022 bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
			2021	2022	
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	N/A	80,38
		2	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindak Lanjuti	-	100
		3	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	0
		5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	0
2.	Meningkatkan Pemberdayaan	6	Temuan Hasil Pemeriksaan	400	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

Masyarakat Desa dan Kelurahan	BPK / Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja				
	7	Persentase Identifikasi Inventarisasi Dalam Penelusuran	100	100	
	8	Pengamanan Bidang Tanah	21,43	21,43	
	9	Persentase Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	N/A	100	
	10	Tingkat Kepatuhan Serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	100	100	
	11	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	91,89	100	



3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Predikat Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	58,21	69,9
		13	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	-	100
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14	Jumlah Inovasi	-	1
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	-	100
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	16	Capaian Output Kegiatan	-	

Dari data pada tabel diatas pada capaian kinerja 2022 menunjukkan adanya perbedaan indikator dengan capaian kinerja 2021. Peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, hanya terdapat pada 3 indikator sasaran sama dan 2 indikator yang menunjukkan angka peningkatan yaitu pada Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 dan Predikat Tata kelola Arsip Perangkat Daerah, Sasaran yang lainnya menunjukkan angka realisasi pada Tahun 2022 sebagai besar telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan di Tahun 2023.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan Anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :



- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan Anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.30. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88,1	8,449,291,836,00	6.874.330.491,00	81,36	Efisien
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50	15,455,147,326,00	15.352.247.254,00	99,40	Tidak Efisien
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	433.248.436,00	320.929.800,00	96,82	Efisien
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	180.000.000,00	0,00	0	Tidak Efisien



5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	18.654.837,00	3.540.000,00	18,98	Efisien
----	---	----	---------------	--------------	-------	---------

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan Anggaran, dari 5 sasaran menunjukkan 3 (tiga) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ada pada Kecamatan Kota Bangun dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,9 % adapun realisasi Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

			14,400,000	14,400,000	100.00	0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,400,000	14,400,000	100.00	0
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,400,000	14,400,000	100.00	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	481,172,712	291,065,750	60.49	190,106,962
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	0	0.00	5,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,878,712	52,847,100	99.94	31,612
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	40,000,000	57.14	30,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,000,000	35,000,000	63.64	20,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,000,000	124,968,050	53.18	110,031,950
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63,294,000	38,250,600	60.43	25,043,400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,276,666,166	976,643,429	76.50	300,022,737



Tabel 3.31. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,449,291,836	6,874,330,491	81.36	1,574,961,345
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,970,705	15,408,000	70.13	6,562,705
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,000,000	4,450,000	40.45	6,550,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,970,705	10,958,000	99.88	12,705
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,000,363,897	4,336,390,750	86.72	663,973,147
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,994,363,897	4,332,970,750	86.76	661,393,147
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,000,000	3,420,000	57.00	2,580,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

				302,531,129	167,031,129	55.21	135,500,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		974,135,037	809,612,300	83.11	164,522,737
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,471,628,356	1,099,181,447	74.69	372,446,909
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6,000,000	3,000,000	50.00	3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		882,331,988	617,906,241	70.03	264,425,747
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		583,296,368	478,275,206	82.00	105,021,162
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		183,090,000	141,241,115	77.14	41,848,885
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7,700,000	4,060,800	52.74	3,639,200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		175,390,000	137,180,315	78.21	38,209,685
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15,455,147,326	15,352,247,254	99.33	102,900,072



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

			10,000,000	0	0.00	10,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			10,000,000	0	0.00	10,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			15,445,147,326	15,352,247,254	99.40	92,900,072	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			10,000,000	0	0.00	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			15,435,147,326	15,352,247,254	99.46	82,900,072	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pertumbuhan Pendapatan Desa	Asli	433,248,436	320,929,800	74.08	112,318,636	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			433,248,436	320,929,800	74.08	112,318,636	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			12,103,800	12,103,800	100.00	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			421,144,636	308,826,000	73.33	112,318,636	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan	Asli	180,000,000	0	0.00	180,000,000	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180,000,000	0	0.00	180,000,000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	175,000,000	0	0.00	175,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000	0	0.00	5,000,000
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,654,837	3,540,000	18.98	15,114,837
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,654,837	3,540,000	18.98	15,114,837
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000	0	0.00	15,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3,654,837	3,540,000	96.86	114,837





BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026. Kecamatan Kota Bangun telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2022.

Tabel 4. 1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja	
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kota Bangun	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun	Nilai	70	N/A	0	Kurang Berhasil
		2	Temuan Administrasi BPK/Inspektoral Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	0	0	Kurang Berhasil
		3	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100	Sangat berhasil
		4	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	2	21,43	Kurang Berhasil
		5	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja	Persen	100	100	100	Sangat berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

			setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)						
		6	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Januari 2022	Persen	100	100	100		Sangat berhasil
		7	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Januari 2022	Persen	100	32	100		Sangat berhasil
		8	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Kurang (C) 48.93	69,9		Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	9	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Nilai	71	80,38	113		Sangat berhasil
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun	10	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun	Persen	49,68	52.66	114		Sangat berhasil
4	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	11	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Kota Bangun	Persen	100	100	100		Sangat berhasil

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori "sangat berhasil" sebanyak 7 Indikator, atau 63,64 %;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori "berhasil" sebanyak 0 Indikator, atau 0 %;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori "cukup berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 9,09 %; dan



- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 27,27 %.

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	23,491,433,186	21,655,106,944	92.18
Belanja Modal	1,044,909,249	892,283,000	85.39
Total	24,536,342,435	22,547,389,944	91.89

Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 22,547,389,944,00 atau 91,89 %. Data tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 24.536.342.435,00 terealisasi sebesar Rp. 22,547,389,944,00 atau 91,89 %, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 20.023.356.403,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 2,524,033,541,00 atau 11,19 %. Belanja Operasi merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 23,491,433,186,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21,655,106,944,00 atau 92,18 % Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Kecamatan Kota Bangun telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 1,044,909,249,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 892,283,000,00 atau 85,39%.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja Tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknis untuk meningkatkan kinerja yang dinilai kurang untuk segera menjadi perhatian khusus.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022

- 2) Mengevaluasi dan memotivasi kinerja ASN di Lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan agar terjadi peningkatan produktivitas kinerja ASN
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkenaan dengan pelayanan publik di Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya


Camat Kota Bangun,

Drs. MAWARDI
Pembina Tk I
NIP. 196605281994031008